ANTHROPOS
Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya
(Journal of Social and Cultural Anthropology)
https://doi.org/10.24114/4pdg6h22

P-ISSN: 2460-4585 | E-ISSN: 2460-4593
Vol. 12, No. 1, 2026: Juli
14-39



Di Antara Hutan dan Ladang: Praktik Sosial dan Pemberdayaan Petani Dalam Skema Hutan Kemasyarakatan di Desa Kutambaru

Between Forests and Fields: Social Practices and Farmer Empowerment within the Community Forestry Scheme in Kutambaru Village

Zakirul Hasri Ramadhan[1], R. Hamdani Harahap[1], Tengku Irmayani[1], Zulkifli Lubis[2], Bengkel[3], Yudhi Ramadani Harahap[1]

[1] Development Studies, Social and Political Sciences, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
[2] Social Anthropology, Social and Political Sciences, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
[3] Political Sciences, Social and Political Sciences, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT
This study examines the dynamics of Social Forestry (SF) policy implementation through the Community Forestry (HKm) scheme in Kutambaru Village, Karo Regency, North Sumatra, focusing on the Perjalangen Forest Farmer Group (KTH), which was granted a management permit covering approximately 30 hectares under a 2021 Decree of the Minister of Environment and Forestry. This study aims to analyze the group's empowerment process, forms of resistance to top-down policies, and the structural, economic, and cultural factors influencing HKm management. A qualitative approach was employed, using observation, in-depth interviews, and a literature review. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and triangulation. Drawing on the concepts of participatory empowerment (Chambers), habitus (Bourdieu), and everyday resistance (Scott), the findings reveal that empowerment has been pursued through institutional assistance and a Field School program on coffee-based agroforestry. However, participation remains largely administrative in nature. The pragmatic habitus of Karo farmers has led them to apply newly acquired knowledge primarily on their privately owned land. Resistance emerges subtly through formal compliance, selective adoption, and hidden transcripts. The main obstacles include administrative burdens, limited access to capital, and the dominance of

KEYWORDS
Social forestry; community forestry; empowerment; habitus; resistance

ARTICLE INFO
Published
20 July 2026

external actors, while social solidarity and the economic potential of coffee cultivation serve as supporting factors. The study concludes that the empowerment process has not yet achieved full self-reliance. Nevertheless, local forms of resistance demonstrate efforts to maintain autonomy and adapt to policy interventions.

CORRESPONDING AUTHOR
Email:
zakirulhasriramadhan@gmail.com

© 2026 The Author(s). This article is an open access article distributed under the term and conditions of the Creative Commons Attribution
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu strategi unggulan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi dua persoalan struktural yang saling berkaitan, yaitu ketimpangan penguasaan lahan dan degradasi ekosistem hutan. Melalui kebijakan ini, negara menargetkan redistribusi akses kelola hutan seluas 12,7 juta hektare kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah menghadirkan keadilan agraria, sekaligus mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (KLHK, 2018; Puspitasari, 2019).

Salah satu instrumen utama kebijakan ini adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu pemberian hak kelola jangka panjang kepada kelompok tani lokal untuk mengelola hutan negara. Skema ini menekankan penerapan sistem *agroforestri*, penggunaan bahan ramah lingkungan dan pembatasan aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem (Adib & Rustinsyah, 2024; Njurumana et al., 2020). Secara konseptual, PS dipandang sebagai pendekatan pembangunan inklusif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Realitas di lapangan menunjukkan dinamika yang jauh lebih kompleks. Meskipun jumlah izin pengelolaan meningkat setiap tahun, tingkat keberhasilan program dalam mengoptimalkan lahan masih rendah. Berbagai evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, lemahnya dukungan kelembagaan, dan minimnya infrastruktur pendukung (Lawasi, 2024). Persoalan ini tidak hanya bersifat teknis. Kegagalan implementasi PS juga mencerminkan ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan realitas sosial-ekonomi masyarakat lokal, yang memiliki struktur nilai, pengalaman, dan strategi penghidupan berbeda dari asumsi kebijakan.

Kondisi tersebut terlihat jelas di Desa Kutambaru, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Desa ini secara ekologis memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian berbasis hutan, dengan sejarah panjang budidaya jagung, kopi, dan pisang. Sejak 2017, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) XV Kabanjahe bersama Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Perjalangen, yang memperoleh izin kelola HKm seluas 30 hektare pada tahun 2021. Program ini diikuti dengan pendampingan melalui

Sekolah Lapang Agroforestri Kopi yang berfokus pada peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan lahan secara berkelanjutan.

Meskipun berbagai pelatihan telah diberikan, hasilnya belum sepenuhnya menggembirakan. Sebagian besar lahan HKm dibiarkan tidak produktif, bibit pohon tidak ditanam, dan partisipasi anggota kelompok lebih bersifat administratif. Sementara itu, pengetahuan dari program sekolah lapang justru lebih banyak diterapkan di lahan pribadi, bukan di area HKm. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis, mengapa kebijakan yang dirancang untuk memberdayakan justru menghasilkan partisipasi simbolik dan ketergantungan baru pada pendamping eksternal.

Konteks masyarakat Karo, habitus pertanian berorientasi pada hasil cepat dan kepastian ekonomi jangka pendek. Lahan dianggap sebagai sumber daya ekonomi sekaligus simbol status sosial. Karena itu, praktik pertanian mereka lebih mengutamakan pola tanam yang efisien dan memberikan hasil segera, seperti monokultur atau kombinasi sederhana berbasis kopi dan jagung. Model *agroforestri* yang diperkenalkan melalui program PS, meskipun ekologis, dianggap membutuhkan investasi waktu dan tenaga yang tinggi. Akibatnya, banyak petani menunda pengelolaan lahan HKm dan fokus pada lahan pribadi yang lebih fleksibel.

Fenomena ini memperlihatkan adanya benturan dua logika kebijakan Negara yang menekankan keberlanjutan ekologis melalui pengelolaan kolektif dan logika lokal masyarakat yang menekankan keamanan ekonomi rumah tangga. Ketidaksesuaian ini menciptakan berbagai bentuk adaptasi dan resistensi, seperti kepatuhan formal terhadap program tanpa implementasi nyata di lapangan (Scott, 1985). Petani mengikuti pelatihan dan memenuhi kewajiban administratif, tetapi menegosiasikan makna kebijakan dengan strategi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Proses pemberdayaan yang menjadi tujuan utama PS perlu dipahami secara lebih mendalam. Mengacu pada pemikiran Robert Chambers dan Amartya Sen, pemberdayaan tidak hanya berarti memberikan akses atau bantuan teknis, tetapi juga memperluas kapabilitas dan ruang kendali masyarakat atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Menggunakan konsep habitus dari Pierre Bourdieu, dapat dipahami bahwa disposisi sosial dan pengalaman historis petani memengaruhi cara mereka merespons kebijakan negara. Selain itu, teori resistensi sehari-hari dari James C. Scott membantu menjelaskan mengapa petani

tidak menolak secara terbuka, melainkan beradaptasi dengan strategi halus yang tetap mempertahankan otonomi mereka.

Kasus Kutambaru memperlihatkan bahwa pemberdayaan dalam skema PS masih bersifat parsial dan simbolik, di mana masyarakat menjadi pelaksana administratif, bukan subjek aktif dalam pengambilan keputusan. Hambatan struktural seperti dominasi aktor eksternal, regulasi yang kaku, serta lemahnya koordinasi antar lembaga turut memperkuat ketimpangan tersebut (Ismariana et al., 2024). Muncul resistensi yang merefleksikan upaya masyarakat mempertahankan rasionalitas lokal di tengah tekanan regulasi nasional.

Naskah ini memandang bahwa keberhasilan program PS tidak dapat diukur semata dari aspek administratif atau produktivitas lahan, melainkan dari kemampuan kebijakan untuk beradaptasi dengan logika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Berupaya mengkaji bagaimana proses pemberdayaan dijalankan dalam skema HKm di Desa Kutambaru, bagaimana habitus dan resistensi petani memengaruhi implementasi kebijakan dan faktor apa yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan. Pendekatan reflektif ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat berbasis hutan sebagai arena negosiasi antara struktur kebijakan dan strategi lokal. Memberikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan Perhutanan Sosial yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2018) untuk memahami secara mendalam dinamika pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Kutambaru. Pendekatan ini dipilih karena isu perhutanan sosial tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Unit analisis utama adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Perjalangen, yang menjadi pelaksana utama pengelolaan HKm di kawasan tersebut.

Peneliti memanfaatkan pengalaman sebagai pendamping lapangan Yayasan PETAI sejak Desember 2023 hingga Juni 2024, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian formal pada Februari–Juli 2025. Proses ini memungkinkan observasi longitudinal terhadap dinamika kelompok dan efektivitas pemberdayaan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam.

Analisis dokumen kelembagaan. Triangulasi sumber untuk menjamin validitas data. Observasi dilakukan dalam berbagai konteks kegiatan kelompok, seperti rapat, kunjungan lapanga dan proses pengolahan kopi.

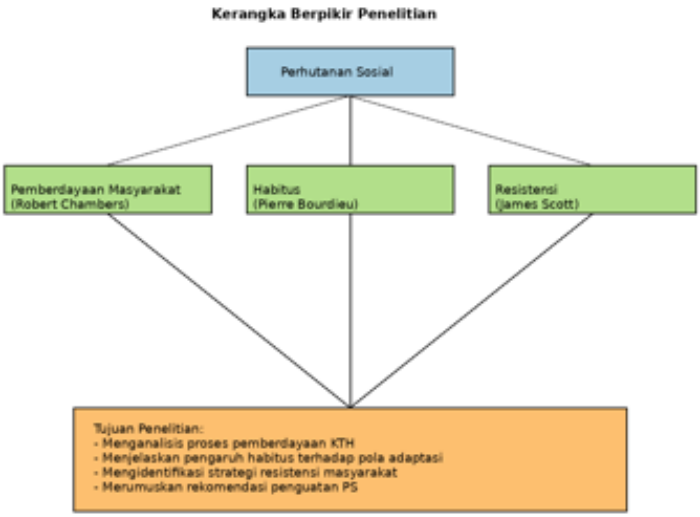
Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan kunci terdiri dari Ketua KTH Perjalangen (Arlando Sinulaki), Ketua Kelompok Tani Gunung Saribu (Rismon Ginting), Kepala KPH XV Kabanjahe, serta pendamping dari Yayasan PETAI. Informan pendukung mencakup anggota kelompok tani seperti keluarga Sembiring dan peneliti eksternal dari Yayasan Angin Jakarta. Kombinasi informan ini bertujuan menggali struktur kebijakan, dinamika sosial dan bentuk resistensi dalam pengelolaan HKm.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kutambaru, Kabupaten Karo, yang memperoleh izin pengelolaan hutan seluas 30 hektare berdasarkan SK KLHK Nomor 8575 Tahun 2021. Pemanfaatan lahan HKm belum optimal karena sebagian masyarakat justru mengaplikasikan pengetahuan agroforestri di kebun pribadi. Fenomena ini menjadi fokus analisis untuk menilai efektivitas pemberdayaan dan dinamika adaptasi lokal terhadap kebijakan perhutanan sosial.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai tema, penyajian disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel kategorisasi, penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan teknik member checking untuk menjaga kredibilitas.

Untuk memperkuat keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori (Spradley, 1979; Lincoln & Guba, 1985). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang holistik mengenai proses pemberdayaan petani, pengaruh habitus agraris terhadap praktik pengelolaan dan bentuk resistensi sehari-hari yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan negara.

Metodologi ini tidak hanya bertujuan menggambarkan fenomena, tetapi juga menelusuri hubungan antara kebijakan, nilai lokal, dan strategi adaptasi masyarakat untuk memperkaya pemahaman teoritis tentang implementasi perhutanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis, Sosial Ekonomi dan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kutambaru

Desa Kutambaru terletak di Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah 10,79 km² dan ketinggian rata-rata 1.049 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini berada di gugusan Pegunungan Bukit Barisan bagian utara yang termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu–Sei Ular. Secara geografis, desa ini berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung di selatan (HL Sibuaten) dan timur (HL Gunung Saribu), sementara di utara dan barat berbatasan dengan areal penggunaan lain (APL) serta hutan lindung desa tetangga (BPS Kabupaten Karo, 2024).

Topografi Kutambaru yang curam (kemiringan >40%) menjadikan sebagian besar lahannya kurang cocok untuk sawah, namun sangat potensial bagi sistem pertanian lahan kering dan agroforestri. Vegetasi alami hutan lindung berperan penting menjaga tata air, menahan erosi, serta menyimpan keanekaragaman hayati yang menjadi sumber Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti madu, rotan, dan buah hutan (FAO, 2018). Potensi air bersih juga relatif melimpah berkat banyaknya mata air dan aliran sungai kecil di sekitar desa.

Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk Desa Kutambaru mencapai 1.758 jiwa (880 laki-laki dan 878 perempuan) dalam 613 kepala keluarga, dengan struktur demografis yang relatif seimbang (BPS Kabupaten Karo, 2024). Sebanyak 922 orang atau lebih dari 50% penduduk bekerja sebagai petani, menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi desa. Komoditas utama yang diusahakan meliputi kopi robusta, pisang, jagung, dan tanaman hortikultura dataran tinggi.

Partisipasi perempuan dalam sektor pertanian mencapai sekitar 47,5%, menunjukkan keterlibatan gender yang signifikan dalam ekonomi desa. Perempuan berperan tidak hanya dalam produksi pertanian, tetapi juga dalam pengelolaan usaha mikro seperti pengolahan hasil panen. Tingkat pendidikan masyarakat umumnya setara pendidikan dasar, sementara akses ke pendidikan menengah masih terbatas karena tidak adanya SMA/SMK di desa. Kondisi ekonomi masyarakat tergolong menengah bawah, dengan penghasilan utama dari pertanian lahan kering berskala kecil (subsistensi hingga semi-komersial).

Nilai-nilai sosial seperti *marsiadapari* (saling tolong-menolong) masih menjadi karakter sosial yang kuat di Kutambaru. Kerja kolektif saat panen, pembukaan lahan, atau perbaikan jalan desa dilakukan secara gotong royong tanpa sistem upah. Hal ini mencerminkan ketahanan sosial komunitas pedesaan yang masih berpegang pada sistem solidaritas agraris tradisional (Ostrom, 1990; Agrawal & Gibson, 1999).

Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik

Desa Kutambaru memiliki dua SD negeri dan satu SMP/MTs negeri, namun belum memiliki sekolah menengah atas. Keterbatasan jumlah guru dan fasilitas menjadi hambatan utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pada bidang kesehatan, terdapat dua Puskesmas Pembantu (Pustu) dan satu Poskesdes, dengan tiga bidan desa sebagai tenaga medis utama. Tidak terdapat dokter permanen di desa, dan masyarakat masih bergantung pada layanan kesehatan di ibu kota kecamatan Munte.

Dari segi infrastruktur fisik, listrik PLN telah menjangkau sebagian besar rumah, tetapi air bersih masih diperoleh dari sumur galian dan mata air. Akses jalan sebagian masih berupa tanah, sehingga transportasi hasil pertanian sering terganggu saat musim hujan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), Kutambaru tergolong Desa Swadaya, yaitu desa yang masih dalam tahap berkembang dan belum mandiri secara kelembagaan maupun ekonomi (Kemendesa PDTT, 2023).

Sektor Pertanian dan Potensi Sumber Daya Alam

Sebagian besar wilayah Kutambaru merupakan lahan kering non-irigasi. Berdasarkan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) KTH Perjalangen 2023–2032, tutupan lahan di kawasan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 30 ha terdiri atas pertanian lahan kering (29,32 ha), hutan sekunder (0,4 ha), dan sawah tadah hujan (0,31 ha). Tanaman utama yang diusahakan adalah kopi robusta, pisang, pokat (jahe merah), dan jagung, disertai budidaya tanaman buah seperti durian dan pepaya.

Sistem *agroforestri* sederhana telah lama dipraktikkan secara tradisional oleh petani Kutambaru, misalnya dengan menanam kopi di bawah naungan pisang atau pohon buah. Praktik ini secara ekologis terbukti menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko longsor, dan meningkatkan keanekaragaman tanaman (Baynes et al., 2015). Selain tanaman pokok, beberapa warga mengembangkan HHBK seperti madu hutan dan tanaman obat sebagai sumber pendapatan tambahan.

Kondisi lahan yang curam dan akses yang sulit membatasi penggunaan alat mekanis, sehingga sebagian besar kegiatan pertanian dilakukan secara manual. Namun, kesuburan tanah vulkanik dan curah hujan tinggi menjadikan kawasan ini cocok untuk pengembangan pertanian berkelanjutan dan ekowisata berbasis hutan di masa depan (Sunderlin et al., 2005; FAO, 2018).

Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Kutambaru

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kutambaru dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Perjalangen, dengan hak kelola seluas 30 hektar berdasarkan SK KLHK No. 8575/ MENLHK/ PSKL/ PKPS/ PSL.0/ 2021. Kelompok ini dibentuk tahun 2017 atas inisiatif KPH XV Kabanjahe dan difasilitasi oleh lembaga pendamping PETAI. Sebelum program HKm dijalankan, kawasan tersebut sering mengalami kebakaran hutan berulang setiap musim kemarau akibat tidak adanya pengelolaan yang jelas.

Melalui skema HKm, masyarakat memperoleh legalitas dan tanggung jawab mengelola lahan yang sebelumnya rusak. Sejak itu, kejadian kebakaran menurun drastis karena masyarakat aktif menjaga kawasan. Salah satu anggota KTH menyatakan,

> *"Dulu tidak ada yang jaga, jadi kalau terbakar ya habis saja. Sekarang, kalau ada asap saja kami langsung cek ke atas."*

Kawasan HKm Perjalangen berfungsi sebagai laboratorium sosial-ekologis di mana sistem agroforestri diterapkan untuk merehabilitasi lahan kritis sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Komoditas utama yang dikembangkan di area ini meliputi kopi robusta, pisang, jahe merah, serta tanaman buah tahunan seperti durian. Selain itu, HHBK seperti madu dan buah hutan diidentifikasi sebagai produk potensial untuk dikembangkan.

Skema ini sejalan dengan kebijakan Perhutanan Sosial Nasional bertujuan memberikan akses kelola kepada masyarakat di kawasan hutan guna meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga fungsi ekologi (KLHK, 2023). Studi terdahulu menunjukkan keberhasilan program semacam ini sangat bergantung pada kejelasan hak kelola, partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan (Larson et al., 2010; Ribot, Agrawal & Larson, 2006).

Dinamika Sosial dan Tantangan Kelembagaan KTH Perjalangen

Pembentukan KTH Perjalangen pada tahun 2017 menjadi tonggak penting perubahan tata kelola hutan di Kutambaru. Dari kawasan yang "tak bertuan" dan rawan kebakaran, kini menjadi area kelola bersama dengan tanggung jawab kolektif. Namun, dinamika sosial pasca-legalisasi menunjukkan tantangan baru. Setelah fase awal pendampingan selesai, partisipasi masyarakat mulai menurun, dan sebagian lahan HKm belum sepenuhnya pulih secara vegetatif.

Hal ini menunjukkan bahwa legalisasi akses tidak otomatis menjamin keberlanjutan pengelolaan (Sahide et al., 2020). Diperlukan mekanisme insentif ekonomi, pendampingan teknis berkelanjutan, serta penguatan kapasitas organisasi kelompok agar pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat berjalan efektif.

Meskipun demikian, keberhasilan awal KTH Perjalangen dalam menekan kebakaran dan mengaktifkan pengawasan sosial terhadap hutan merupakan capaian penting. Kesadaran ekologis tumbuh seiring dengan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kawasan hutan. Kasus Kutambaru memperlihatkan bahwa pendekatan kolaboratif yang mengakui hak masyarakat lokal dapat menjadi model pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan adil, sesuai prinsip *community-based forest management* (Colfer, 2021; Chhatre & Agrawal, 2009).

Hutan Kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam

pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan. Konsep ini menekankan pentingnya pengetahuan lokal dan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap hutan sebagai dasar pengelolaan yang berkelanjutan (Agrawal, 2001; Colfer, 2021). Melalui pembentukan kelompok seperti Kelompok Tani Hutan (KTH) atau lembaga adat, masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan, penyusunan aturan dan pembagian manfaat (Ostrom, 1990).

Pengelolaan berbasis komunitas terbukti meningkatkan efektivitas konservasi, terutama ketika hak kelola masyarakat diakui secara hukum (Larson, Barry, & Dahal, 2010). Masyarakat adat membawa pengetahuan tradisional seperti praktik agroforestri dan rotasi tanaman yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem (Baynes et al., 2015). Selain itu, keterlibatan masyarakat menciptakan rasa kepemilikan dan mengurangi deforestasi ilegal (Sunderlin et al., 2005).

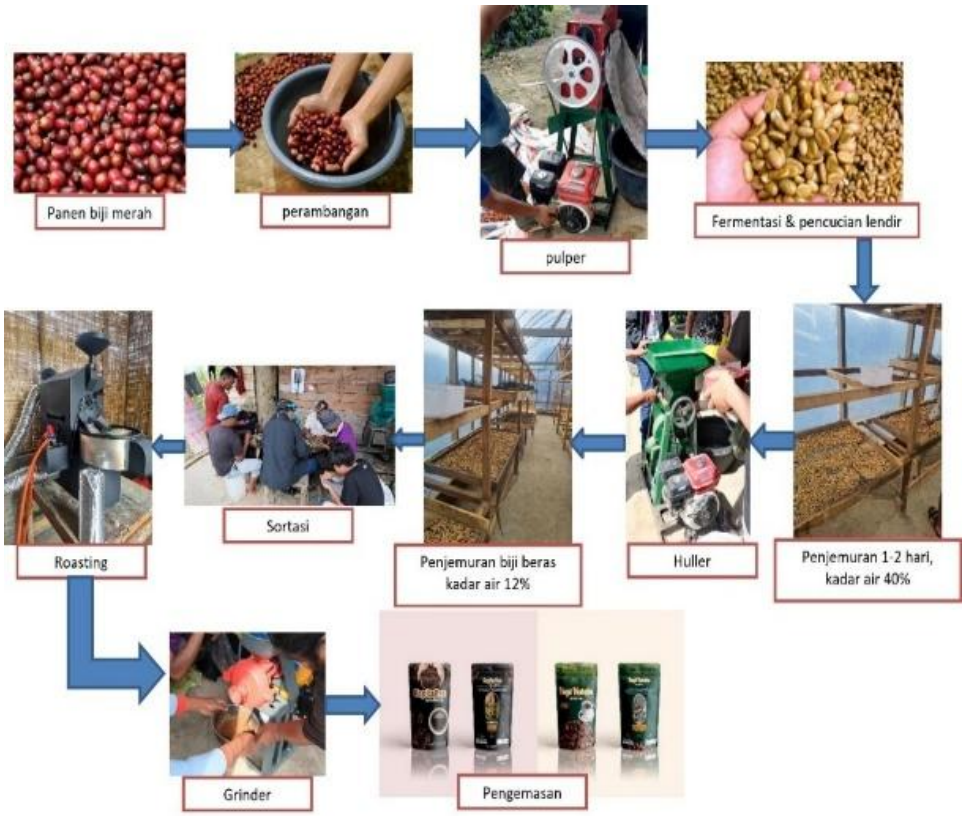
Secara ekonomi, HKm meningkatkan kesejahteraan melalui produk hutan non-kayu dan ekowisata berbasis komunitas (Chhatre & Agrawal, 2009). Namun, keberhasilan program bergantung pada distribusi manfaat yang adil dan transparan (Persha, Agrawal, & Chhatre, 2011). Tantangan utama meliputi konflik kepentingan, lemahnya kelembagaan lokal, dan ketidakpastian hukum (Larson & Soto, 2008; Sahide et al., 2020).

Di Indonesia, HKm berada dalam payung Perhutanan Sosial, yang hingga 2023 mencakup 4,7 juta hektare (MoEF, 2023). Keberhasilan implementasinya tidak hanya ditentukan oleh pemberian akses lahan, tetapi juga oleh penguatan kapasitas masyarakat dan adaptasi kebijakan terhadap konteks sosial-budaya lokal, agar pengelolaan hutan benar-benar berkelanjutan dan berkeadilan.

Proses Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Perjalangen

Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Perjalangen berfokus pada penguatan kapasitas, kelembagaan, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas ±30 hektare berdasarkan SK Menteri LHK No. 8575/ MENLHK-PSKL/ PKPS/ PSL.0/ 12/ 2021. Pendekatan yang digunakan menekankan partisipasi aktif melalui Sekolah Lapang (SL) Agroforestri Kopi sebagai sarana pembelajaran dialogis sesuai konsep pemberdayaan partisipatif Robert Chambers. Kelembagaan kelompok diperkuat melalui penyusunan SOP internal dan keuangan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan unit usaha "Kopi Kutata" berbasis agroforestri. Meski struktur organisasi dan legalitas telah terbentuk, tantangan masih ada pada peningkatan kapasitas teknis, motivasi anggota

dan orientasi usaha jangka panjang agar pemberdayaan benar-benar menghasilkan kemandirian sosial-ekonomi dan ekologis.



Gambar 2. Alur Produksi Produk Kelompok KUPS Kopi

Praktik Sekolah Lapangan Partisipatif

Sekolah Lapang (SL) Agroforestri Kopi 2023–2024 menjadi sarana utama pemberdayaan KTH Perjalangen yang difasilitasi oleh Yayasan PETAI dan KPH XV Kabanjahe. Berbeda dari pelatihan konvensional, SL menekankan pembelajaran partisipatif berbasis praktik lapangan, diskusi dua arah, dan eksperimen kolektif, sejalan dengan prinsip *co-learning* antara petani dan fasilitator. Program terdiri dari 10 pertemuan yang membangun kapasitas teknis dan ekologis petani secara bertahap.

Tahapan awal meliputi orientasi, pembentukan regu belajar (PB, PO1, PO2), serta praktik penangkapan Mikroorganisme Lokal (MOL) dari bambu. Selanjutnya, peserta melakukan pengamatan ekosistem dan identifikasi hama, belajar membuat Pupuk Organik Cair (POC) dan Padat (POP) dari limbah kebun, serta meracik Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) dan pupuk NPK alami dari bahan lokal seperti pisang dan jagung.

Tahap lanjutan mencakup produksi agen hayati *Trichoderma sp.* untuk pengendalian penyakit akar, di mana petani belajar melalui kegagalan dan uji ulang, menumbuhkan daya tahan dan kolaborasi. Kegiatan ditutup dengan refleksi dan penyusunan rencana tindak lanjut berupa pembangunan rumah produksi kopi dan kompos. SL ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan kemandirian, solidaritas, dan kesadaran ekologis.



Gambar 3. Kegiatan Sekolah Lapang Pembuatan Pupuk Organik

Komponen Utama	Keterangan
Fokus	Peningkatan pendapatan melalui agroforestri kopi berbasis organik
Metode	Materi – Praktik – Diskusi – Monitoring
Materi Inti	MOL, POC, POP, ZPT, NPK Cair, Trichoderma, Ekosistem, Pemangkasan, dll.
Pendekatan	Partisipatif, lokal, kontekstual, dan berbasis masalah (problem-based learning)
Tahapan Transformasi	Transfer ilmu → Aksi lapangan → Evaluasi → Kemandirian usaha
Output Nyata	Pupuk organik buatan sendiri, pembiasaan pemangkasan, rumah produksi direncanakan
Nilai Tambah	Peningkatan kapasitas petani, pengurangan biaya produksi, nilai jual kopi meningkat

Prinsip Keberlanjutan	Ekologis (organik), sosial (gotong royong), ekonomi (nilai tambah lokal)

Tabel 1. Tahapan Sekolah Lapang

Bentuk Partisipasi dan Usaha Perhutanan Kelompok

Pemberdayaan di KTH Perjalangen tidak hanya membangun keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat relasi sosial yang menopang pengelolaan sumber daya. Partisipasi anggota tercermin melalui kehadiran rapat, iuran rutin, dan keterlibatan dalam keputusan kelompok, meski tingkatnya bervariasi. Faktor pendorong utama adalah ikatan sosial berbasis marga, peluang peningkatan pendapatan kopi, serta adanya SOP yang menjamin transparansi. Namun, tantangan muncul karena orientasi ekonomi jangka pendek lebih dominan dibanding komitmen ekologis jangka panjang.

Perempuan berperan dalam produksi rumah tangga seperti pengolahan kopi, tetapi belum banyak terlibat dalam pengambilan keputusan. Secara ekonomi, kelompok fokus pada kopi arabika dalam sistem agroforestri dengan kapasitas terbatas. Meskipun potensi pasar besar, usaha masih berskala mikro, menegaskan perlunya penguatan kapasitas bisnis, pemasaran, dan inklusi gender.

KTH Perjalangen: Diberdayakan atau Subjek Pembangunan

KTH Perjalangen menunjukkan pergeseran dari objek menjadi subjek pembangunan melalui penerapan Sekolah Lapang (SL) Agroforestri Kopi yang menempatkan petani sebagai aktor utama pembelajaran. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan petani mengamati, bereksperimen, dan mengevaluasi lahannya sendiri, sejalan dengan gagasan Chambers tentang "membalik urutan" pembangunan. Kurikulum SL disusun bersama antara fasilitator dan petani agar relevan dengan kebutuhan lokal. Meski program ini menekan ketergantungan melalui produksi pupuk organik dan pengolahan pascapanen, konsolidasi pasar dan model koperasi demokratis masih diperlukan agar hasil pemberdayaan benar-benar berkelanjutan secara ekonomi dan sosial.

***Reversals of Learning:* Belajar dari Akar Rumput**

Sekolah Lapang (SL) Agroforestri Kopi di KTH Perjalangen menekankan pembelajaran timbal balik antara fasilitator dan petani. Fasilitator berperan sebagai pendamping yang belajar bersama, bukan pemberi instruksi tunggal. Kegagalan

dalam praktik lapangan dianggap sebagai bagian dari proses belajar kolektif, bukan kesalahan. Melalui pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), pengetahuan lokal diakui setara dengan pengetahuan ilmiah. Petani menjadi produsen pengetahuan melalui pengalaman, pencatatan, dan diskusi reflektif. Inilah bentuk "*reversal of learning*", di mana petani menjadi guru bagi diri sendiri, menumbuhkan kepercayaan diri untuk berinovasi dengan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Empowerment through Process, Not Transfer

Pengalaman KTH Perjalangen menunjukkan bahwa pemberdayaan sejati tumbuh melalui proses sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar transfer teknologi atau bantuan modal. Sekolah Lapang (SL) menekankan pembentukan kapasitas, keberanian bereksperimen, dan kemandirian petani dalam mengelola sumber daya lokal. Petani tidak hanya diajari membuat pupuk organik dan memahami sistem agroforestri, tetapi juga dilatih berpikir kritis serta menyesuaikan teknik dengan kondisi lahan mereka. Proses ini menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan adaptif yang terus berkembang meski pendampingan formal berakhir.

Penggunaan pupuk organik, agen hayati, dan sistem agroforestri menunjukkan orientasi jangka panjang menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Kelembagaan KTH diperkuat melalui SOP keuangan transparan, rapat rutin, dan pengelolaan aset kolektif, menciptakan kontrol lokal atas sumber daya. Hal ini meningkatkan *sense of ownership* dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar.

Secara ekonomi, usaha kopi kelompok masih berskala mikro namun berpotensi besar jika dikelola melalui model koperasi partisipatif yang memperkuat solidaritas dan efisiensi kolektif. Dengan demikian, pemberdayaan di KTH Perjalangen berfokus pada proses pembelajaran dan penguatan kapasitas sosial-ekologis jangka panjang, sesuai pandangan bahwa keberlanjutan hanya terwujud bila masyarakat memegang kendali atas pembangunan mereka sendiri.

Habitus dan Bentuk Resistensi Kelompok Tani Hutan Perjalangen

Pemberdayaan melalui Sekolah Lapang (SL) Agroforestri Kopi di KTH Perjalangen berhasil membangun kapasitas petani dan memperkenalkan praktik ramah lingkungan. Namun, dalam praktiknya, muncul bentuk-bentuk resistensi halus yang mencerminkan ketegangan antara logika program dan habitus petani. Salah satu contohnya adalah ketika bantuan bibit durian tahun 2024 tidak ditanam

sesuai rencana. Akses sulit, larangan penggunaan alat berat, serta ketidakpastian lahan jangka panjang membuat petani enggan berinvestasi pada tanaman yang hasilnya lama.

Petani Karo terbiasa dengan sistem pertanian monokultur berorientasi hasil cepat seperti kopi dan hortikultura. Habitus ini, sebagaimana dijelaskan Purwanto & Sembiring (2015), membentuk cara berpikir pragmatis terhadap waktu, tenaga, dan keuntungan. Ketika agroforestri diperkenalkan sebagai model baru, petani menilainya tidak rasional secara ekonomi. Akibatnya, pengetahuan yang diperoleh dari SL seperti pembuatan pupuk organik justru diterapkan di lahan pribadi, bukan di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Fenomena ini menunjukkan bahwa resistensi bukan penolakan terbuka, melainkan strategi adaptif: petani memilih jalur aman untuk meminimalkan risiko dan menjaga otonomi atas penghidupan mereka. Dalam konteks teori James Scott (1985), perilaku ini adalah bentuk *everyday resistance*, di mana kepatuhan formal menutupi praktik-praktik negosiasi yang mempertahankan rasionalitas lokal.

Habitus, Field, dan Capital Petani Karo

Kehidupan masyarakat Karo di Desa Kutambaru mencerminkan sistem agraris yang telah terbentuk secara historis, di mana pertanian menjadi pusat ekonomi dan identitas budaya. Komoditas utama seperti jagung, kopi, dan pisang dipilih karena siklus panen singkat dan nilai ekonomi yang pasti. Jagung memberi pendapatan cepat, sementara kopi berfungsi sebagai "tabungan hidup." Orientasi pada hasil jangka pendek mencerminkan logika ekonomi pragmatis berbasis kebutuhan rumah tangga.

Praktik pertanian mereka juga sarat nilai sosial, seperti tradisi *aron* kerja gotong royong bergiliran yang menumbuhkan solidaritas dan menjaga ritme musim tanam. Pengetahuan lokal tentang rotasi tanaman, pupuk organik, dan etnobotani diwariskan turun-temurun sebagai bagian alami kehidupan, bukan hasil pelatihan modern.

Dalam kerangka (Bourdieu, 1977; 1990), pola ini terbentuk dari *habitus* disposisi historis yang memandu tindakan dan interaksi dengan *field* (arena sosial) dan *capital* (modal ekonomi, sosial, kultural).

Dengan demikian, respon masyarakat terhadap program Hutan Kemasyarakatan (HKm) bukanlah sekadar penolakan teknis, melainkan ekspresi habitus agraris yang telah mengakar dan sulit diubah secara cepat.

Praktik Keseharian dan Habitus Petani Karo

Habitus petani Karo di Desa Kutambaru tercermin dalam pola hidup agraris yang diwariskan lintas generasi. Bertani bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari ritme sosial dan budaya. Mereka cenderung memilih komoditas berumur pendek seperti jagung dan kopi karena memberikan hasil cepat dan pasti. Kopi bahkan berfungsi sebagai "tabungan hidup" yang bisa diuangkan sewaktu-waktu.

Tradisi *aron* kerja kolektif bergiliran di ladang menjadi simbol solidaritas sosial dan pengetahuan ekologis lokal, seperti membaca musim dan tanda alam untuk menentukan waktu tanam. Praktik ini adalah ekspresi habitus: kebiasaan yang wajar tanpa perlu dijelaskan secara formal.

Ketika kebijakan perhutanan sosial memperkenalkan sistem agroforestri, habitus ini berhadapan dengan logika baru yang dirasa asing. Salah seorang anggota kelompok, Benjamin Sembiring, menyampaikan keraguannya.

> *"Labo ate kami la bage, tapi peraturenna e sesuai ras cara kami er juma. suruhna kami nuan si lenga I eteh, tah jadi tah lang si hasilna banci meter si dat. Tapi uga gia, labo banci I ikutken kami, gelah Ola I katakenna ngelanggar. E gia la bage te kami, la tutus ate. Lanai seri peraturenna ras musim kami, la seri ras cara kami"*

Terjemahannya:

> *"Bukan berarti kami mau melawan, tapi aturannya itu tidak sesuai dengan cara kami bertani. Ada yang disuruh tanam yang belum tentu jadi, yang tidak ada manfaat terasa cepat. Tapi mau bagaimana, tidak mungkin kami abaikan, nanti dibilang melanggar. Jadi kami kerjakan saja, asal ada, asal tidak melanggar. Tapi bukan itu yang ada di hati kami… tidak sepenuh hati. Aturannya tidak cocok dengan musim kami, tidak cocok dengan cara kami."*

Ketika sistem *agroforestri* diperkenalkan melalui kebijakan perhutanan sosial, muncul ketegangan. Petani menganggap aturannya tidak sesuai dengan musim dan logika kerja mereka. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi jangka pendek dan strategi pragmatis mereka berakar pada disposisi historis yang membentuk rasionalitas khas petani Karo.

Habitus dan *Field:* Benturan dengan Arena Kebijakan

Habitus petani Karo yang berorientasi pada hasil cepat dan praktik kolektif berbasis tradisi harus berhadapan dengan *field* baru dari kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Dalam *field* ini, negara memperkenalkan norma seperti larangan alat berat, kewajiban menanam pohon keras, dan sistem agroforestri berbasis konservasi. Meskipun dirancang untuk keberlanjutan ekologis, aturan tersebut tidak selalu sejalan dengan cara bertani turun-temurun yang pragmatis dan berorientasi pada kepastian hasil. Akibatnya, petani lebih memilih fokus pada lahan pribadi yang mudah diakses dan cepat memberi keuntungan, sementara kepatuhan terhadap aturan HKm bersifat administratif saja. Fenomena ini menggambarkan *selective adoption* (Li, 2007) petani mengadopsi elemen yang sesuai dengan kepentingan mereka, seperti pembuatan pupuk organik, namun mengabaikan praktik yang tidak cocok, seperti penanaman MPTS di kawasan HKm.

Capital, Posisi Subordinat, dan Resistensi Selektif

Praktik sosial petani Karo di Desa Kutambaru dipengaruhi oleh keterbatasan berbagai bentuk *capital* yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat dalam kebijakan perhutanan sosial. Modal ekonomi yang minim, seperti lahan sempit dan sulitnya akses modal, membuat petani lebih memprioritaskan lahan pribadi dibandingkan lahan HKm yang berisiko tinggi. Modal sosial yang kuat melalui jaringan lokal efektif untuk praktik tradisional, tetapi kurang kompatibel dengan tuntutan birokrasi formal.

Modal budaya berupa pengetahuan lokal bernilai tinggi secara comunitas, namun kurang diakui dalam logika kebijakan negara. Sementara itu, modal simbolik dikuasai negara dan organisasi pendamping, sehingga petani sulit memengaruhi aturan program. Kondisi ini melahirkan resistensi selektif, di mana petani tidak menolak kebijakan secara terbuka, tetapi beradaptasi secara rasional dengan melakukan adopsi parsial, mengikuti formalitas administratif, dan memprioritaskan kepentingan rumah tangga. Pola ini sejalan dengan konsep *selective adoption*, yang menunjukkan bahwa petani cenderung mengintegrasikan inovasi secara terbatas sesuai sumber daya, norma, dan strategi ekonomi mereka.

Habitus, Field, dan *Capital* dalam Ketegangan Perhutanan Sosial

Habitus petani Karo di Kutambaru terbentuk dari orientasi panen cepat, solidaritas *aron*, dan pengetahuan ekologis lokal yang berfungsi sebagai rasionalitas praktis lintas generasi. Habitus ini berhadapan secara timpang dengan *field* kebijakan

perhutanan sosial yang membawa logika konservasi dan investasi jangka panjang melalui agroforestri. Aturan formal negara kerap dipersepsi sebagai *symbolic violence* karena dipaksakan tanpa penyesuaian terhadap strategi hidup petani, sehingga partisipasi mereka dalam HKm cenderung bersifat administratif dan simbolik.

Ketidaksesuaian antara habitus dan field diperparah oleh keterbatasan *capital*: modal ekonomi yang lemah, modal sosial yang kuat namun terbatas dalam konteks birokrasi, modal budaya yang terdevaluasi dalam wacana pembangunan, serta ketiadaan modal simbolik. Kombinasi ini menempatkan petani dalam posisi subordinat, memaksa mereka patuh demi menjaga akses legal tanpa kemampuan memengaruhi desain kebijakan. Interaksi yang timpang antara habitus, field, dan capital melahirkan pola resistensi halus berupa kepatuhan formal tanpa internalisasi substantif.

Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan tidak cukup melalui transfer teknologi atau akses lahan, melainkan membutuhkan pengakuan terhadap logika lokal, modal yang tersedia, dan strategi hidup masyarakat agar perhutanan sosial tidak berhenti pada keterlibatan simbolik semata.

Pola Resistensi KTH Perjalangen

Pola resistensi KTH Perjalangen menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap program perhutanan sosial berlangsung secara halus dan terstruktur. Bentuk *foot-dragging* tampak pada pengabaian bibit durian yang secara administratif diterima, tetapi tidak ditanam karena pertimbangan rasional: akses sulit, larangan alat berat, biaya tinggi, dan orientasi ekonomi jangka pendek yang lebih mengutamakan jagung dan kopi. Tindakan ini bukan apatisme, melainkan strategi negosiasi kewajiban secara diam-diam.

Di ruang publik, kelompok menampilkan *public transcript* berupa kepatuhan simbolik melalui kehadiran dalam pelatihan, pengisian absensi, dokumentasi, dan laporan administratif. Praktik ini berfungsi melindungi posisi legal dan menjaga akses terhadap program, meskipun praktik nyata tidak sepenuhnya mengikuti logika kebijakan.

Di ruang privat, muncul *hidden transcript* dalam bentuk keluhan, sindiran, dan humor antarpetani, yang menyuarakan kritik terhadap pembatasan negara tanpa konfrontasi terbuka. Keseluruhan praktik ini menunjukkan bahwa resistensi tidak bersifat frontal, melainkan menjadi bagian dari *everyday politics*, di mana petani

mempertahankan otonomi dan menegosiasikan relasi kuasa secara subtil sambil tetap menjaga keberlanjutan akses formal.

Faktor Struktural, Ekonomi, dan Budaya dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Kemasyarakatan

Hambatan struktural menjadi faktor utama belum optimalnya pengelolaan lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh KTH Perjalangen. Meskipun izin kelola seluas 30 hektare telah diberikan melalui IUPHKm sejak 2021, kerangka regulasi justru menciptakan kompleksitas baru di tingkat tapak. Kewajiban penyusunan dokumen seperti RKPS, RKT, dan RTL membebani petani yang memiliki keterbatasan kapasitas administratif, sehingga mereka sangat bergantung pada pendamping eksternal. Ketergantungan ini melemahkan kelembagaan internal dan membuat aktivitas kelompok menurun saat pendampingan berkurang.

Keterbatasan infrastruktur memperparah kondisi, karena lokasi HKm sulit diakses, jarak jauh dari permukiman, dan ketiadaan jalan yang memadai. Larangan penggunaan alat berat serta tingginya biaya tenaga kerja semakin mengurangi minat petani untuk berinvestasi tenaga dan modal. Selain itu, desain kelembagaan yang top-down membuat perencanaan lebih mencerminkan orientasi program nasional dibanding kebutuhan petani, sehingga rasa kepemilikan melemah. Sistem monitoring yang administratif dan minim pendampingan lanjutan menyebabkan kesenjangan antara perencanaan dan praktik tidak tertangani, dan lahan HKm tetap terbengkalai.

Aturan dalam SK/RKPS	Potensi Hambatan Bagi Petani	Strategi Adaptif Petani
Larangan penggunaan alat berat	Proses pengolahan lahan lambat; petani memilih lahan pribadi yang lebih cepat digarap.	Mengalihkan fokus ke lahan pribadi yang lebih fleksibel.
Kewajiban menanam tanaman kehutanan/MPTS	Tidak sesuai dengan orientasi ekonomi jangka pendek; petani lebih tertarik pada model perkebunan	Tetap menanam komoditas cepat panen di luar area HKm.
Pembatasan jenis tanaman perkebunan	Mempersempit pilihan-pilihan dalam bertana,m	Menanam tanaman dan emnggunakan pengetahuan untuk digunakan dalam pertanian mandiri dikebun sendiri

Kewajiban menyusun RKPS & RKT periodik	Masyarakat tidak terbiasa dengan tata kelola teknokratis; dokumen jadi formalitas belaka.	Menyusun dokumen sekadar formalitas, tanpa implementasi nyata.
Kewajiban pelaporan administrasi ke KPH	Pelaporan tertulis sulit dilakukan; rawan dianggap tidak patuh.	Mengurangi intensitas pelaporan, atau melaporkan sebagian saja.
Larangan alih fungsi/pembakaran hutan	Membatasi pilihan petani pada lahan; konflik muncul bila ada kebutuhan ekspansi.	Menggarap lahan di luar batas izin secara diam-diam.
Tanggung jawab kelembagaan (pengurus mengawasi semua anggota)	Beban pengurus terlalu berat; sulit mengendalikan orientasi anggota yang beragam.	Anggota bertindak mandiri, pengurus hanya mewakili secara simbolis.

Tabel 2. Faktor Struktural

Faktor Ekonomi Pengelolaan HKm

Pengelolaan HKm oleh KTH Perjalangen terhambat terutama oleh faktor ekonomi yang membentuk strategi penghidupan petani. Petani lebih memprioritaskan lahan pribadi yang ditanami kopi, jagung, pisang, dan tembakau karena memberikan pendapatan cepat dan likuid untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kopi berfungsi sebagai "tabungan hidup" karena harganya relatif stabil dan fleksibel dipanen. Sebaliknya, pola agroforestri HKm menuntut investasi jangka panjang melalui tanaman pohon keras yang baru menghasilkan setelah 5–7 tahun, sehingga kurang menarik secara ekonomi.

Keterbatasan modal semakin menyulitkan karena biaya pemeliharaan, transportasi, dan tenaga kerja cukup tinggi, terutama setelah melemahnya sistem gotong royong *aron* dan bergesernya ke sistem upah harian. Akses lahan yang sulit dan ketiadaan kepastian pasar hasil HKm juga meningkatkan risiko. Akibatnya, petani secara rasional mengalihkan tenaga dan dana ke usaha yang lebih pasti, menjadikan HKm sebagai prioritas ekonomi yang terpinggirkan.

Faktor Ekonomi	Hambatan /Realitas	Implikasi bagi Rumah Tangga	Dampak terhadap Pengelolaan HKm

Kopi (komoditas jangkar)	Likuid, dapat dipanen kapan saja, harga relatif stabil (±Rp 15-20 ribu/kg gelondongan ceri merah).	Menjadi tabungan hidup, prioritas tenaga & modal diarahkan ke kopi.	HKm dipandang tidak kompetitif karena manfaatnya jangka panjang (5–7 tahun).
Jagung (*cashflow* cepat)	Siklus panen singkat 3–4 bulan, hasil bisa 3–5 juta/0,2 ha per musim.	Memberikan arus kas cepat untuk biaya sekolah & kebutuhan mendesak.	Petani enggan mengalihkan tenaga ke HKm yang hasilnya tertunda lama.
Padi darat (subsistensi)	Produksi terbatas untuk konsumsi, nilai moneter kecil.	Mengurangi belanja beras - menjaga cadangan cash rumah tangga.	HKm kalah relevan karena padi lebih nyata menjaga ketahanan pangan.
Biaya tenaga kerja (hilangnya aron)	Gotong royong bergeser jadi upah harian Rp 100–150 ribu/HOK.	Beban biaya pembukaan & pemeliharaan lahan makin tinggi.	HKm sulit digarap karena modal tunai terbatas.
Transportasi & akses	Lokasi HKm di lereng curam, larangan alat berat.	Biaya angkut hasil & buka jalan tinggi.	Partisipasi terbatas, HKm hanya jadi proyek administratif.
Pasar & harga HKm	Tidak ada jaminan kontrak atau pembeli untuk hasil pohon keras.	Risiko tinggi, petani memilih komoditas dengan pasar jelas.	HKm diprioritaskan terakhir, hanya digarap bila ada insentif.

Tabel 3. Faktor Ekonomi

Faktor Budaya Pengelolaan HKm

Pengelolaan HKm oleh KTH Perjalangen terhambat oleh faktor budaya yang berakar pada habitus agraris petani Karo. Petani lebih memprioritaskan tanaman berumur pendek seperti kopi, pisang, dan tanaman sela karena memberikan hasil cepat dan mudah dipasarkan, sementara tanaman keras agroforestri cenderung diabaikan. Pola ini bukan semata kegagalan teknis, melainkan bentuk rasionalitas budaya yang menekankan kepastian hasil jangka pendek.

Selain itu, terjadi pergeseran orientasi dari kerja kolektif ke praktik privat. Pengetahuan dari Sekolah Lapang lebih banyak diterapkan di kebun pribadi daripada di lahan HKm. Melemahnya tradisi *aron* dan pergeseran ke sistem kerja upahan membuat kegiatan kolektif semakin mahal dan tidak menarik. Akibatnya, lahan HKm sulit menjadi ruang kerja bersama. Hambatan budaya ini memperlihatkan

ketidaksesuaian antara logika konservasi jangka panjang dalam kebijakan perhutanan sosial dengan strategi hidup dan nilai agraris masyarakat Karo.

Dimensi Budaya	Pertanian di Lapangan	Dampak pada Pengelolaan HKm
Orientasi nilai terhadap komoditas	Petani Karo lebih memilih menanam kopi, jagung, pisang, dan tembakau yang cepat menghasilkan; tanaman keras (durian, petai, alpukat) dari program banyak tidak tertanam.	Agroforestri yang menuntut horizon waktu panjang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi rumah tangga sehari-hari.
Preferensi ruang privat dibanding ruang kolektif	Pengetahuan dari Sekolah Lapang diterapkan di kebun pribadi, bukan di lahan HKm seluas 30 ha.	Pemberdayaan berjalan, tetapi "bermigrasi" ke arena privat; HKm jadi prioritas rendah.
Perubahan pola kerja (aron → upah)	Tradisi gotong royong *aron* melemah karena migrasi pemuda; kini tenaga kerja berbasis upah Rp 80–100 ribu/hari.	Setiap kegiatan kolektif HKm menuntut biaya tunai tinggi, melemahkan partisipasi sukarela.
Fragmentasi kelembagaan	KTH Perjalangen berfungsi lebih sebagai wadah administratif untuk syarat legal (SK IUPHKm, RKPS, RKT), bukan arena konsolidasi kerja.	Agenda kolektif seperti pembukaan jalan dan penanaman sering tertunda, HKm tidak terkelola optimal.

Tabel 4. Faktor Budaya

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Kutambaru berhasil secara administratif, tetapi gagal secara substantif. Hak akses telah diberikan dan pelatihan dilaksanakan, namun sebagian besar lahan HKm tidak produktif, sementara pengetahuan program justru dimanfaatkan di lahan pribadi. Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan direduksi menjadi prosedur formal tanpa memberikan ruang kendali nyata bagi petani dalam menentukan arah program.

Temuan menunjukkan bahwa habitus dan strategi penghidupan lokal tetap dominan. Petani memprioritaskan komoditas berumur pendek dan lahan pribadi yang memberikan kepastian ekonomi dibanding pola agroforestri jangka panjang. Resistensi muncul dalam bentuk halus melalui kepatuhan administratif dan pengalihan praktik ke ruang privat, sebagai cara mempertahankan otonomi tanpa konfrontasi terbuka.

Kegagalan pengelolaan HKm bukan semata soal teknis, tetapi akibat ketidaksesuaian desain kebijakan berorientasi ekologis dengan struktur sosial-ekonomi lokal. Pemberdayaan sejati membutuhkan pendekatan pembangunan yang inklusif, mengakui nilai dan strategi masyarakat, serta menciptakan ruang negosiasi yang setara. Keberhasilan perhutanan sosial seharusnya diukur dari tumbuhnya kapasitas kolektif dan rasa kepemilikan masyarakat, bukan hanya capaian administratif semata.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada masyarakat Desa Kutambaru dan anggota KTH Perjalangen atas keterbukaan, waktu dan kepercayaan yang diberikan selama proses penelitian.

Penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada rekan Akademik atas arahan kritik dan masukan yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada instansi terkait, pendamping lapangan dan semua pihak yang telah memberikan dukungan data, fasilitas dan bantuan teknis. Tanpa dukungan dan kerja sama berbagai pihak, naskah ini tidak dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Agrawal, A. (2001). Common resources and institutional sustainability. In E. Ostrom, T. Dietz, N. Dolšak, P. C. Stern, S. Stonich, & E. U. Weber (Eds.), *The drama of the commons* (pp. 41–85). National Academy Press.

Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: The role of community in natural resource conservation. *World Development, 27*(4), 629–649. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2

Baynes, J., Herbohn, J., Smith, C., Fisher, R., & Bray, D. (2015). Key factors which influence the success of community forestry in developing countries. *Global Environmental Change, 35*, 226–238. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.09.011

Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.

BPS Kabupaten Karo. (2024). *Statistik daerah Kabupaten Karo 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo. https://karo.bps.go.id

Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.

Chhatre, A., & Agrawal, A. (2009). Trade-offs and synergies between carbon storage and livelihood benefits from forest commons. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 106*(42), 17667–17670. https://doi.org/10.1073/pnas.0905308106

Colfer, C. J. P. (2021). *Community-based forest management: Lessons from the field*. Routledge.

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

FAO. (2018). *The state of the world's forests 2018: Forest pathways to sustainable development*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/state-of-forests/en/

Ismariana, I., Santoso, B., & Rahman, F. (2024). *Resistensi lokal dalam implementasi perhutanan sosial: Studi kasus Kutambaru, Sumatera Utara*. Penerbit Sumatera Utara.

Kemendesa PDTT. (2023). *Indeks Desa Membangun (IDM) 2023*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. https://www.kemendesa.go.id

KLHK. (2018). *Kebijakan perhutanan sosial: Panduan implementasi dan strategi*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. https://www.menlhk.go.id

KLHK. (2023). *Perhutanan sosial: Laporan tahunan dan kebijakan terbaru*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Larson, A. M., Barry, D., & Dahal, G. R. (2010). *Community rights to forests in Latin America: Progress amid resistance*. Routledge.

Larson, A. M., & Soto, F. (2008). Decentralization of natural resource governance regimes. *Annual Review of Environment and Resources, 33*, 213–239. https://doi.org/10.1146/annurev.environ.33.020607.095522

Lawasi, H. (2024). *Evaluasi implementasi perhutanan sosial di Indonesia: Kendala dan peluang*. Penerbit Sumatera Utara.

Li, T. M. (2007). Practices of assemblage and community forest management. *Economy and Society, 36*(2), 263–293. https://doi.org/10.1080/03085140701254308

MoEF. (2023). *Perhutanan sosial di Indonesia: Statistik dan laporan capaian 2023*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Njurumana, R., Santosa, B., & Wibowo, T. (2020). *Community-based forest management and sustainable livelihoods in Indonesia*. IPB Press.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

Persha, L., Agrawal, A., & Chhatre, A. (2011). Social and ecological synergy: Local rulemaking, forest livelihoods, and biodiversity conservation. *Science, 331*(6024), 1606–1608. https://doi.org/10.1126/science.1199343

Purwanto, B., & Sembiring, R. (2015). *Habitus pertanian dan adaptasi lokal masyarakat Karo*. Penerbit Sumatera Utara.

Puspitasari, D. (2019). *Perhutanan sosial dan keadilan agraria: Studi kasus di Sumatera Utara*. Gadjah Mada University Press.

Ribot, J., Agrawal, A., & Larson, A. M. (2006). Recentralizing while decentralizing: How national governments reappropriate forest resources. *World Development, 34*(11), 1864–1886. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.11.020

Sahide, M. A. K., Giessen, L., & Giessen, A. (2020). Forest decentralization and community participation: Challenges for local governance. *Forest Policy and Economics, 118*, 102216. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102216

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.

Spradley, J. P. (1979). *The ethnographic interview*. Holt, Rinehart and Winston.

Sunderlin, W. D., Hatcher, J., & Liddle, M. (2005). *From exclusion to ownership? Challenges and opportunities in advancing forest tenure reform*. Rights and Resources Initiative.